



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN 2022**



BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA

NOMOR **2** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan mendesak dan luar biasa, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 juncto Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.07 /2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 297);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA  
dan  
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2022.





## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
8. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

x ✓ l

11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah :

1. semula	Rp.830.139.770.945,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.118.125.502,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 831.257.896.447,00

b. Belanja Daerah :

1. semula	Rp.1.065.139.770.945,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 20.994.784.336,00)</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp.1.044.144.986.609,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp. 212.887.090.162,00)

✓

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan Pembiayaan :

a) semula	Rp.240.000.000.000,00	
b) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 22.112.909.838,00)</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp.217.887.090.162,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____ 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp.212.887.090.162,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) semula	Rp. 54.796.736.943,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 11.369.477.367,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 43.427.259.576,00

b. Pendapatan Transfer:

1) semula	Rp.742.869.084.002,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 282.306.207,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan		Rp.742.586.777.795,00

*[Handwritten signature]*

c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah :

1) semula	Rp. 32.473.950.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.769.909.076,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp. 45.243.859.076,00

Pasal 4

( 1 ) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah :

1) semula	Rp. 13.649.993.367,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 380.000.000,00)</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 13.269.993.367,00

b. Retribusi Daerah :

1) semula	Rp. 25.747.785.364,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 4.638.565.852,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 21.109.219.512,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :

1) semula	Rp. 6.500.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 4.025.635.050,00)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 2.474.364.950,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :

1) Semula	Rp. 8.898.958.212,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 2.325.276.465,00)</u>	

	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp. 6.573.681.747,00
( 2 )	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
	a. Tranfer Pemerintah Pusat :	
	1) semula	Rp.723.482.166.056,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 6.360.855.338,00)</u>
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.717.121.310.718,00
	b. Transfer Antar Daerah :	
	1) Semula	Rp. 19.386.917.946,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.078.549.131,00</u>
	Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp. 25.465.467.077,00
( 3 )	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, bersumber dari :	
	a. Pendapatan Hibah :	
	1) semula	Rp. 0,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.324.179.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp. 13.324.179.000,00
	b. Dana Darurat :	
	1) semula	Rp.0,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.0,00</u>
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.0,00
	c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan :	
	1) semula	Rp.32.473.950.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 554.269.924,00)</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  
setelah Perubahan Rp. 31.919.680.076,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Operasional:

1) semula	Rp.546.092.960.741,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 14.655.412.894,00)</u>	
Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan		Rp.531.437.547.847,00

b. Belanja Modal:

1) semula	Rp.340.472.984.310,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 502.161.551,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp.339.970.822.759,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) semula	Rp. 8.527.209.891,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 5.527.209.891,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp.3.000.000.000,00

d. Belanja Transfer

1) semula	Rp.170.046.616.003,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 310.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan		Rp.169.736.616.003,00



Pasal 6

( 1 ) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai :

1) semula	Rp.336.467.178.939,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.28.156.774.728,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.308.310.404.211,00

b. Belanja Barang dan Jasa :

1) semula	Rp.190.591.802.881,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 11.599.212.434,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp.202.191.015.315,00

c. Belanja Bunga :

1) semula	Rp. 6.294.815.621,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 1.094.469.370,00)</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. 5.200.346.251,00

d. Belanja Subsidi :

1) semula	Rp. 0,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp. 0,00

e. Belanja Hibah :

1) semula	Rp. 2.384.163.300,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.786.618.770,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 5.170.782.070,00

f. Belanja Bantuan Sosial:

1) semula Rp. 10.355.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 210.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 10.565.000.000,00

( 2 ) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah:

1) sebelum Rp. 3.679.191.076,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 238.762.000,00

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp. 3.917.953.076,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

1) sebelum Rp. 22.666.589.982,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 4.323.863.186,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan Rp. 26.990.453.168,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan :

1) sebelum Rp. 21.896.636.347,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 614.882.765,00)

Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah Perubahan Rp. 21.281.753.582,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) sebelum Rp.287.838.671.975,00

2) bertambah/(berkurang) (Rp. 4.721.124.451,00)

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan Rp.283.117.547.524,00

*Handwritten signature or initials*

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1) sebelum	Rp.	4.391.894.930,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>271.220.479,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp.	4.663.115.409,00
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
1) sebelum	Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah Perubahan	Rp.	0,00

( 3 ) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :

a. Sebelum	Rp.	8.527.209.891,00
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>5.527.209.891,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000,00

( 4 ) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, terdiri dari atas :

a. Belanja Bagi Hasil :		
1) sebelum	Rp.	1.364.999.222,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	1.364.999.222,00
b. Belanja Bantuan Keuangan :		
1) sebelum	Rp.	168.681.616.781,00
2) bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>310.000000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	168.371.616.781,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan :

1) sebelum	Rp.240.000.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 22.112.909.838,00)</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp.217.887.090.162,00

b. Pengeluaran Pembiayaan :

1) sebelum	Rp. 5.000.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 8

( 1 ) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (a), terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya :

1) semula	Rp.15.000.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 9.672.193.663,00)</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan		Rp. 5.327.806.337,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) semula	Rp. 0,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan		Rp. 0,00

*Handwritten signature*

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) semula	Rp.	225.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>12.444.297.993,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	212.555.702.007,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.581.818,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	3.581.818,00
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

( 2 ) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00

*[Handwritten signature]*

b. Penyertaan Modal Daerah		
1) semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan		Rp. 5.000.000.000,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
1) semula	Rp. 0,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang setelah perubahan		Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) semula	Rp. 0,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman setelah perubahan		Rp. 0,00
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		
1) semula	Rp. 0,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

*x ✓ ✓*



(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lembata ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan;
Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah; dan
Lampiran XVII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

*Handwritten signature*

Pasal 11

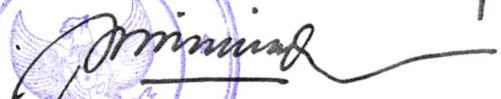
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba  
pada tanggal 17 Oktober 2022

PENJABAT BUPATI LEMBATA,  
  
MARSIANUS JAWA



Diundangkan di Lewoleba  
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,



PASKALIS GLA TAPO BALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022 NOMOR 299

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1 /2022

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
Lembata  
Nomor : 2 Tahun 2022  
Tanggal : 17 Oktober 2022

**KABUPATEN LEMBATA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>54.796.736.943</b>	<b>43.427.259.576</b>	<b>(11.369.477.367)</b>	<b>21 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	13.649.993.367	13.269.993.367	(380.000.000)	3 %
4.1.02	Retribusi Daerah	25.747.785.364	21.109.219.512	(4.638.565.852)	18 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.500.000.000	2.474.364.950	(4.025.635.050)	62 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.898.958.212	6.573.681.747	(2.325.276.465)	26 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>742.869.084.002</b>	<b>742.586.777.795</b>	<b>(282.306.207)</b>	<b>0 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	723.482.166.056	717.121.310.718	(6.360.855.338)	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.386.917.946	25.465.467.077	6.078.549.131	31 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>32.473.950.000</b>	<b>45.243.859.076</b>	<b>12.769.909.076</b>	<b>39 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	13.324.179.000	13.324.179.000	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.473.950.000	31.919.680.076	(554.269.924)	2 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>830.139.770.945</b>	<b>831.257.896.447</b>	<b>1.118.125.502</b>	<b>0 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>546.092.960.741</b>	<b>531.437.547.847</b>	<b>(14.655.412.894)</b>	<b>3 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	336.467.178.939	308.310.404.211	(28.156.774.728)	8 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.591.802.881	202.191.015.315	11.599.212.434	6 %
5.1.03	Belanja Bunga	6.294.815.621	5.200.346.251	(1.094.469.370)	17 %
5.1.05	Belanja Hibah	2.384.163.300	5.170.782.070	2.786.618.770	117 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.355.000.000	10.565.000.000	210.000.000	2 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>340.472.984.310</b>	<b>339.970.822.759</b>	<b>(502.161.551)</b>	<b>0 %</b>

5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.679.191.076	3.917.953.076	238.762.000	6 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.666.589.982	26.990.453.168	4.323.863.186	19 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.896.636.347	21.281.753.582	(614.882.765)	3 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	287.838.671.975	283.117.547.524	(4.721.124.451)	2 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.391.894.930	4.663.115.409	271.220.479	6 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>8.527.209.891</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>(5.527.209.891)</b>	<b>65 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.527.209.891	3.000.000.000	(5.527.209.891)	65 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>170.046.616.003</b>	<b>169.736.616.003</b>	<b>(310.000.000)</b>	<b>0 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.364.999.222	1.364.999.222	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	168.681.616.781	168.371.616.781	(310.000.000)	0 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.065.139.770.945</b>	<b>1.044.144.986.609</b>	<b>(20.994.784.336)</b>	<b>2 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(235.000.000.000)</b>	<b>(212.887.090.162)</b>	<b>22.112.909.838</b>	<b>-9 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>240.000.000.000</b>	<b>217.887.090.162</b>	<b>(22.112.909.838)</b>	<b>9 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.000.000.000	5.327.806.337	(9.672.193.663)	64 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	225.000.000.000	212.555.702.007	(12.444.297.993)	6 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	3.581.818	3.581.818	100 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>240.000.000.000</b>	<b>217.887.090.162</b>	<b>(22.112.909.838)</b>	<b>9 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>235.000.000.000</b>	<b>212.887.090.162</b>	<b>(22.112.909.838)</b>	<b>9 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>



Pj. Bupati Lembata

MARSIANUS JAWA



**KABUPATEN LEMBATA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.108.946.364	316.375.310.878	329.232.212.786	0	0	645.607.523.664	17.026.988.612	321.057.550.855	327.447.744.131	0	0	648.505.294.986
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	10.000.000	149.356.949.317	23.643.797.001	0	0	173.000.746.318	5.000.000	156.511.037.270	23.115.608.810	0	0	179.626.646.080
1 01	1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN	10.000.000	149.356.949.317	23.643.797.001	0	0	173.000.746.318	5.000.000	156.511.037.270	23.115.608.810	0	0	179.626.646.080
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	15.065.546.364	116.275.360.234	15.221.762.300	0	0	131.497.122.534	16.838.588.612	116.381.035.859	17.945.113.965	0	0	134.326.149.824
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	1.410.470.000	77.233.645.354	3.859.762.300	0	0	81.093.407.654	1.410.470.000	77.195.306.699	7.048.351.240	0	0	84.243.657.939
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	13.655.076.364	39.041.714.880	11.362.000.000	0	0	50.403.714.880	15.428.118.612	39.185.729.160	10.896.762.725	0	0	50.082.491.885
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.026.900.000	29.664.067.813	290.361.653.485	0	0	320.025.721.298	176.900.000	26.636.222.542	273.058.242.356	0	0	299.694.464.898
1 03	1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.026.900.000	29.664.067.813	290.361.653.485	0	0	320.025.721.298	176.900.000	26.636.222.542	273.058.242.356	0	0	299.694.464.898
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.500.000	9.802.058.698	5.000.000	0	0	9.807.058.698	2.500.000	9.505.004.628	4.600.000	0	0	9.509.604.628
1 04	1.04.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.500.000	9.802.058.698	5.000.000	0	0	9.807.058.698	2.500.000	9.505.004.628	4.600.000	0	0	9.509.604.628

*Handwritten signature*



1	05		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	3.500.000	7.602.974.406	0	0	0	7.602.974.406	3.500.000	8.736.369.772	13.324.179.000	0	0	22.060.548.772
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.000.000	5.148.721.714	0	0	0	5.148.721.714	1.000.000	4.916.727.413	0	0	0	4.916.727.413
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.500.000	2.454.252.692	0	0	0	2.454.252.692	2.500.000	3.819.642.359	13.324.179.000	0	0	17.143.821.359
1	06		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	500.000	3.673.900.410	0	0	0	3.673.900.410	500.000	3.287.880.784	0	0	0	3.287.880.784
1	06	2.08.2.14.1.06.01.0000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	3.673.900.410	0	0	0	3.673.900.410	0	3.287.880.784	0	0	0	3.287.880.784
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	5.291.287.500	40.272.075.651	8.020.703.024	0	0	48.292.778.675	3.079.948.400	43.807.606.575	8.890.458.634	0	0	52.698.065.209
2	07		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	0	1.876.204.384	0	0	0	1.876.204.384	0	1.900.328.370	0	0	0	1.900.328.370
2	07	3.32.2.07.0.00.02.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	1.876.204.384	0	0	0	1.876.204.384	0	1.900.328.370	0	0	0	1.900.328.370
2	08		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	3.500.000	2.201.855.243	0	0	0	2.201.855.243	3.500.000	1.941.112.045	0	0	0	1.941.112.045
2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.000.000	2.201.855.243	0	0	0	2.201.855.243	1.000.000	1.941.112.045	0	0	0	1.941.112.045
2	09		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	0	256.118.250	0	0	0	256.118.250	0	271.883.250	0	0	0	271.883.250
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	0	256.118.250	0	0	0	256.118.250	0	271.883.250	0	0	0	271.883.250

2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	671.508.610	3.712.491.076	0	0	4.383.999.686	0	517.045.850	3.951.253.076	0	0	4.468.298.926
2	10	1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	0	671.508.610	3.712.491.076	0	0	4.383.999.686	0	517.045.850	3.951.253.076	0	0	4.468.298.926
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000	2.848.879.208	197.179.070	0	0	3.046.058.278	10.000.000	2.615.464.218	192.279.120	0	0	2.807.743.338
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000	2.848.879.208	197.179.070	0	0	3.046.058.278	10.000.000	2.615.464.218	192.279.120	0	0	2.807.743.338
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.500.000	3.637.662.490	0	0	0	3.637.662.490	2.500.000	3.180.159.220	0	0	0	3.180.159.220
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.500.000	3.637.662.490	0	0	0	3.637.662.490	2.500.000	3.180.159.220	0	0	0	3.180.159.220
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	3.600.477.544	0	0	0	3.600.477.544	0	3.417.949.370	29.000.000	0	0	3.446.949.370
2	13	1.06.2.13.0.00.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	3.600.477.544	0	0	0	3.600.477.544	0	3.417.949.370	29.000.000	0	0	3.446.949.370
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	4.517.056.205	590.342.300	0	0	5.107.398.505	0	4.591.151.365	590.342.300	0	0	5.181.493.665
2	14	2.08.2.14.1.06.01.0000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	4.517.056.205	590.342.300	0	0	5.107.398.505	0	4.591.151.365	590.342.300	0	0	5.181.493.665
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4.034.012.500	3.927.060.202	265.844.110	0	0	4.192.904.312	1.506.526.400	4.639.798.983	465.820.670	0	0	5.105.619.653

2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	4.034.012.500	3.927.060.202	265.844.110	0	0	4.192.904.312	1.506.526.400	4.639.798.983	465.820.670	0	0	5.105.619.653
2	16		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>172.479.000</b>	<b>2.749.662.829</b>	<b>29.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.778.762.829</b>	<b>145.000.000</b>	<b>2.933.011.186</b>	<b>246.864.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.179.875.186</b>
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	172.479.000	2.749.662.829	29.100.000	0	0	2.778.762.829	145.000.000	2.933.011.186	246.864.000	0	0	3.179.875.186
2	17		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>725.096.000</b>	<b>4.336.198.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.336.198.017</b>	<b>701.296.000</b>	<b>4.348.955.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.348.955.112</b>
2	17	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	725.096.000	4.336.198.017	0	0	0	4.336.198.017	701.296.000	4.348.955.112	0	0	0	4.348.955.112
2	18		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>8.200.000</b>	<b>2.192.104.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.192.104.810</b>	<b>110.306.000</b>	<b>2.128.436.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.128.436.554</b>
2	18	2.18.2.07.3.32.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.200.000	2.192.104.810	0	0	0	2.192.104.810	110.306.000	2.128.436.554	0	0	0	2.128.436.554
2	19		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>0</b>	<b>2.604.262.471</b>	<b>1.838.687.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.442.949.939</b>	<b>0</b>	<b>6.930.503.014</b>	<b>2.024.087.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.954.590.482</b>
2	19	2.22.2.19.0.00.02.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN	0	2.604.262.471	1.838.687.468	0	0	4.442.949.939	0	6.930.503.014	2.024.087.468	0	0	8.954.590.482
2	20		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>0</b>	<b>59.087.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.087.090</b>	<b>0</b>	<b>52.232.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.232.090</b>
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	59.087.090	0	0	0	59.087.090	0	52.232.090	0	0	0	52.232.090
2	21		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>0</b>	<b>38.793.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.793.000</b>	<b>0</b>	<b>20.443.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.443.000</b>
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	38.793.000	0	0	0	38.793.000	0	20.443.000	0	0	0	20.443.000
2	22		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>333.000.000</b>	<b>1.684.708.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.684.708.290</b>	<b>598.320.000</b>	<b>1.639.139.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.639.139.670</b>


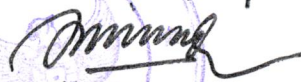
2	22	2.22.2.19.0.00.02.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN	80.000.000	1.684.708.290	0	0	0	1.684.708.290	563.320.000	1.639.139.670	0	0	0	1.639.139.670
2	23		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	0	63.779.150	900.000.000	0	0	963.779.150	0	63.779.150	900.000.000	0	0	963.779.150
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	0	63.779.150	900.000.000	0	0	963.779.150	0	63.779.150	900.000.000	0	0	963.779.150
2	24		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	2.500.000	3.006.657.858	487.059.000	0	0	3.493.716.858	2.500.000	2.616.214.128	490.812.000	0	0	3.107.026.128
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.500.000	3.006.657.858	487.059.000	0	0	3.493.716.858	2.500.000	2.616.214.128	490.812.000	0	0	3.107.026.128
3			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	2.063.944.000	28.097.240.366	1.837.384.000	0	0	29.934.624.366	854.000.000	26.078.426.679	1.003.433.650	0	0	27.081.860.329
3	25		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	525.344.000	3.334.655.219	955.500.000	0	0	4.290.155.219	332.000.000	3.694.394.171	5.500.000	0	0	3.699.894.171
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	525.344.000	3.334.655.219	955.500.000	0	0	4.290.155.219	332.000.000	3.694.394.171	5.500.000	0	0	3.699.894.171
3	26		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	0	4.749.669.448	634.984.000	0	0	5.384.653.448	0	4.140.748.572	624.647.100	0	0	4.765.395.672
3	26	2.22.3.26.0.00.03.0000	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0	4.749.669.448	634.984.000	0	0	5.384.653.448	0	4.140.748.572	624.647.100	0	0	4.765.395.672
3	27		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	1.538.100.000	19.791.052.639	185.000.000	0	0	19.976.052.639	521.500.000	17.483.303.315	231.100.000	0	0	17.714.403.315
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.538.100.000	19.791.052.639	185.000.000	0	0	19.976.052.639	521.500.000	17.483.303.315	231.100.000	0	0	17.714.403.315
3	30		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	0	93.085.500	10.000.000	0	0	103.085.500	0	481.526.442	0	0	0	481.526.442
3	30	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	93.085.500	10.000.000	0	0	103.085.500	0	481.526.442	0	0	0	481.526.442
3	31		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	0	116.536.200	51.900.000	0	0	168.436.200	0	273.104.909	142.186.550	0	0	415.291.459

3	31	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	116.536.200	51.900.000	0	0	168.436.200	0	273.104.909	142.186.550	0	0	415.291.459
3	32		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	500.000	12.241.360	0	0	0	12.241.360	500.000	5.349.270	0	0	0	5.349.270
3	32	3.32.2.07.0.00.02.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	500.000	12.241.360	0	0	0	12.241.360	500.000	5.349.270	0	0	0	5.349.270
4			<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	35.000.000	47.813.222.997	689.851.500	0	0	48.503.074.497	192.000.000	49.455.623.865	1.580.427.134	0	0	51.036.050.999
4	01		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	30.000.000	21.734.155.612	156.050.000	0	0	21.890.205.612	187.000.000	23.620.281.811	1.067.386.303	0	0	24.687.668.114
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	30.000.000	21.734.155.612	156.050.000	0	0	21.890.205.612	187.000.000	23.620.281.811	1.067.386.303	0	0	24.687.668.114
4	02		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	5.000.000	26.079.067.385	533.801.500	0	0	26.612.868.885	5.000.000	25.835.342.054	513.040.831	0	0	26.348.382.885
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	5.000.000	26.079.067.385	533.801.500	0	0	26.612.868.885	5.000.000	25.835.342.054	513.040.831	0	0	26.348.382.885
5			<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	804.307.393.081	69.093.305.058	649.878.160	8.527.209.891	170.046.616.003	248.317.009.112	809.908.759.435	49.955.665.170	891.386.120	3.000.000.000	169.736.616.003	223.583.667.293
5	01		<b>PERENCANAAN</b>	5.000.000	5.118.241.036	0	0	0	5.118.241.036	5.000.000	4.581.769.987	0	0	0	4.581.769.987
5	01	5.01.5.05.5.03.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.000.000	5.118.241.036	0	0	0	5.118.241.036	5.000.000	4.581.769.987	0	0	0	4.581.769.987
5	02		<b>KEUANGAN</b>	804.299.143.081	52.578.143.630	69.950.000	8.527.209.891	170.046.616.003	231.221.919.524	809.900.509.435	35.333.376.570	392.300.000	3.000.000.000	169.736.616.003	208.462.292.573
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	790.616.072.214	47.435.539.104	0	8.527.209.891	170.046.616.003	226.009.364.998	796.417.438.568	29.883.660.662	178.450.000	3.000.000.000	169.736.616.003	202.798.726.665
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	13.683.070.867	5.142.604.526	69.950.000	0	0	5.212.554.526	13.483.070.867	5.449.715.908	213.850.000	0	0	5.663.565.908
5	03		<b>KEPEGAWAIAN</b>	3.250.000	11.347.240.502	579.928.160	0	0	11.927.168.662	3.250.000	9.980.498.723	499.086.120	0	0	10.479.584.843
5	03	5.03.5.05.5.03.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	521.379.668	80.833.500	0	0	602.213.168	0	789.380.218	0	0	0	789.380.218

5	03	5.01.5.05.5.03.02.0000	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	521.379.668	80.833.500	0	0	602.213.168	0	789.380.218	0	0	0	789.380.218
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	3.250.000	10.825.860.834	499.094.660	0	0	11.324.955.494	3.250.000	9.191.118.505	499.086.120	0	0	9.690.204.625
5	05		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	0	<b>49.679.890</b>	0	0	0	<b>49.679.890</b>	0	<b>60.019.890</b>	0	0	0	<b>60.019.890</b>
5	05	5.01.5.05.5.03.02.0000	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	49.679.890	0	0	0	49.679.890	0	60.019.890	0	0	0	60.019.890
6			<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	500.000	<b>6.714.059.034</b>	0	0	0	<b>6.714.059.034</b>	500.000	<b>6.081.303.999</b>	0	0	0	<b>6.081.303.999</b>
6	01		<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	500.000	<b>6.714.059.034</b>	0	0	0	<b>6.714.059.034</b>	500.000	<b>6.081.303.999</b>	0	0	0	<b>6.081.303.999</b>
6	01	6.01.5.03.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	500.000	6.714.059.034	0	0	0	6.714.059.034	500.000	6.081.303.999	0	0	0	6.081.303.999
7			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	332.200.000	<b>32.496.172.861</b>	<b>42.954.840</b>	0	0	<b>32.539.127.701</b>	<b>195.200.000</b>	<b>29.842.694.423</b>	<b>157.373.090</b>	0	0	<b>30.000.067.513</b>
7	01		<b>KECAMATAN</b>	332.200.000	<b>32.496.172.861</b>	<b>42.954.840</b>	0	0	<b>32.539.127.701</b>	<b>195.200.000</b>	<b>29.842.694.423</b>	<b>157.373.090</b>	0	0	<b>30.000.067.513</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN NUBATUKAN	325.000.000	12.177.333.295	14.000.000	0	0	12.191.333.295	188.000.000	11.478.483.526	83.440.500	0	0	11.561.924.026
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN LEBATUKAN	1.000.000	2.457.988.553	0	0	0	2.457.988.553	1.000.000	2.415.293.960	0	0	0	2.415.293.960
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN OMESURI	1.000.000	2.440.409.471	28.954.840	0	0	2.469.364.311	1.000.000	2.271.819.642	28.954.840	0	0	2.300.774.482
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BUYASURI	500.000	2.849.510.283	0	0	0	2.849.510.283	500.000	2.406.636.939	0	0	0	2.406.636.939
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN ATADEI	1.000.000	2.585.512.401	0	0	0	2.585.512.401	1.000.000	2.437.913.703	25.657.750	0	0	2.463.571.453
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN NAGAWUTUNG	500.000	2.882.192.620	0	0	0	2.882.192.620	500.000	2.377.061.188	19.320.000	0	0	2.396.381.188
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN ILE APE	1.000.000	2.177.020.499	0	0	0	2.177.020.499	1.000.000	2.101.487.417	0	0	0	2.101.487.417
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN WULANDONI	1.000.000	2.860.038.742	0	0	0	2.860.038.742	1.000.000	2.359.355.047	0	0	0	2.359.355.047
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN ILE APE TIMUR	1.200.000	2.066.166.997	0	0	0	2.066.166.997	1.200.000	1.994.643.001	0	0	0	1.994.643.001
8			<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	500.000	<b>5.231.573.896</b>	0	0	0	<b>5.231.573.896</b>	500.000	<b>5.158.676.281</b>	0	0	0	<b>5.158.676.281</b>



8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	500.000	5.231.573.896	0	0	0	5.231.573.896	500.000	5.158.676.281	0	0	0	5.158.676.281
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	500.000	5.231.573.896	0	0	0	5.231.573.896	500.000	5.158.676.281	0	0	0	5.158.676.281
<b>TOTAL</b>				<b>830.139.770.945</b>	<b>546.092.960.741</b>	<b>340.472.984.310</b>	<b>8.527.209.891</b>	<b>170.046.616.003</b>	<b>1.065.139.770.945</b>	<b>831.257.896.447</b>	<b>531.437.547.847</b>	<b>339.970.822.759</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>169.736.616.003</b>	<b>1.044.144.986.609</b>


  
 Pj. Bupati Lembata
   

  
 MARSIANUS JAWA